

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.I Sejarah Singkat berdirinya Kota Yogyakarta

Pada tahun 1755 Sri Sultan Hamengku Buwono I membangun Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Kota Yogyakarta tepatnya di Hutan Beringin sebuah tempat yang terletak antara sungai Code dan juga sungai Winongo. Pembangunan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat di lokasi tersebut di karenakan alasan pertahanan serta keamanan. Dibangunnya Kota Yogyakarta dan juga Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus mengukuhkan Sri Sultan Hamengkubuwono I sebagai Raja pertama. Setelah beberapa dekade bahkan abad kemudian, pasca diproklamirkannya Indonesia sebagai Negara yang merdeka pada tahun 1945 tepatnya bulan Agustus tanggal 17, Presiden Republik Indonesia Soekarno memberikan piagam kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX serta Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai tanda pengangkatan menjadi Gubernur serta Wakil Gubernur bagi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah itu, Sri Sultan mengeluarkan mandat atau sabda yang menyatakan bahwa Daerah Kesultanan dan Pakualaman Jogja adalah Daerah yang berstatus Istimewa dan sepakat untuk melebur menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 18 yang tertera dalam Undang-Undang 1945. Kemudian pada bulan Oktober tahun 1945 tepatnya tanggal 30, Sri Sultan kembali mengeluarkan amanatnya yang menyuratkan

penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan di Yogyakarta akan di pimpin atau dikuasai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono Ke IX , Paku ALam VIII dan juga BPKN (<https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota>,15/05/2019).

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Yogyakarta.

Ditinjau dari aspek legitimasi dan administratif penyelenggaraan pemerintahan, Kota Yogyakarta entah itu yang berada di bawah naungan Kasultanan ataupun yang berada dibawah pengaruh dari Pakualaman sebenarnya bisa atau mempunyai kewenangan untuk membentuk sebuah Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat Kota dan juga DPK. Namun, kendalanya saat itu Jogja belumlah menjadi Kota Paraja atau Kota dengan otonominya sendiri, hal ini dikarenakan sebab pengaruh dari Pemerintah Yogyakarta masih sangat besar utamanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan (<https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota>,15/05/2019).

Sehingga terbitnya Undang-Undang No. 17 pada tahun 1947 meniscayakan terbentuknya Kota Praja di Kota Yogyakarta yang sebelumnya secara legitimasi berada dibawah naungan Daerah Kesultanan dan juga Pakualaman. Pasal 1 UU tersebut mengamanatkan bahwa Kabupaten Kota Praja

Yogyakarta yang di dalamnya terdiri dari wilayah Kesultanan Jogja, Pakualaman, dan juga Daerah lain dari Kabupaten Bantul seperti UmbulHarjo kini dan juga Kotagede (dulu bagian Kabupaten Bantul) berhak mengatur, berhak untuk mengurus, dan menyelenggarakan segala urusan rumah tangganya, dan juga pemerintahan. Kemudian, Daerah Otonomi yang baru saja dibentuk tersebut kemudian pada waktu itu dikenal dan dinamai dengan Haminte Kota Jogja (<https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota>,15/05/2019).

4.2 Deskripsi Wilayah Kota Yogyakarta

Secara etimologis Yogyakarta seperti terdiri dari dua suku kata yakni Ayodhya yang berarti damai atau penuh kedamaian serta dapat juga diartikan tanpa perang (ayodhya) sebab yodhya artinya perang, dan juga kata Karta yang mengandung artian baik. Selain itu, jika ditelisik lebih jauh dalam epos legendaris Ramayana dikenal Sebuah Kota yang sangat termashur yakni Ayodhya yang ternyata juga merupakan nama salah satu kota di Negara India sana (<https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota>,15/05/2019)

4.2. 1 Keadaann Geografis

Selanjutnya, secara Geografis Kota Yogyakarta berada pada 110°24''19''-110°28''53'' di bujur timur serta 7°''15''24-7°''49''26 pada lintang selatan, yang wilayahnya berada pada ketinggian rata-rata 114 meter diatas permukaan laut. Kota Yogyakarta di apit oleh dua Kabupaten yakni Kabupaten Sleman bagian sebelah Timur serta Kabupaten Bantul di bagian atau Wilayah sebelah Barat (<https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>, 17/05/2019)

Jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten lain yang berada di Wilayah pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi memiliki luas wilayah yang paling sempit yakni hanya 32,5 Kilometer persegi dan itu artinya Kota Yogyakarta hanya memenuhi 1,026 persen dari jumlah keseluruhan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi secara administrative terdiri dari 14 Kecamatan, dengan 45 Kelurahan, sebanyak 614 Rukun Warga (RW) dan juga sebanyak 2.528 Rukun Tetangga (RT)(<https://jogjaprov.go.id/berita/detail/luas-wilayah>10/05/2019).

Dengan luas Wilayah sebesar 32,5 Kilometer persegi Kota Yogyakarta berada di lembah Gunung Merapi dengan kemiringan tanah sebesar 0-2 persen, dengan kemiringan tersebut Kota Yogyakarta bisa dikatakan relatif datar. Separuh Wilayah Kota Yogyakarta berada pada 1.657 Hektare terletak diketinggian dibawah 100 meter, sementara sisanya 1.594 hektare terletak atau berada di ketinggian 100 sampai 119 meter diatas permukaan laut (MDPL). Selanjutnya, Tekstur atau jenis tanah di Kota Yogyakarta merupakan jenis tanah vulkanis muda atau bisa juga disebut tanah regosol. Sementara di beberapa Wilayah seperti di Kecamatan Umbulharjo misalnya mempunyai jenis tanah lempung pasir yang berformasi geologis batuan berjenis sedimen andesit yang tua (<https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>, 17/05/2019).

4.2.2 Iklim Kota Yogyakarta

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa stasiun pengamat hujan di beberapa Wilayah Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan pada tahun 2016 hujan dengan intensitas yang tinggi turun pada bulan februari yakni 388,5 Rata-rata hari hujan perbulan 7,06 hari.milimeter sedangkan pada bulan November menjadi bulan dengan intensitas curah hujan yang paling rendah yakni 0 milimeter (<https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>, 17/05/2019).

4.2.3 Keadaan Sosial

4.2.3.1 Aspek Penduduk

Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi DIY pada Tahun 2019 tercatat memiliki penduduk sebanyak 416.403 Jiwa dengan pembagian atau klasifikasi berdasarkan jeni kelamin yakni Laki-laki sebanyak 201.778 atau sekitar 48,86 persen dan yang Perempuan sebanyak 211.825 Jiwa atau sekitar 51,14 persen (<https://jogjaprov.go.id/berita/detail/jumlah-penduduk> 12/05/2019).

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Mantrijeron	17.225	18.163	35.388
2.	Kraton	10.680	11.255	21.935

3.	Mergangsan	15.517	16.583	32.100
4.	Umbulharjo	34.214	35.603	69.817
5.	Kotagede	16.815	17.266	34.081
6.	Gondokusuman	20.614	21.908	42.522
7.	Danurejan	10.434	10.840	21.274
8.	Pakualaman	5.166	5.611	10.777
9.	Gondomanan	7.321	7.720	15.041
10.	Ngampilan	9.117	9.469	18.586
11.	Wirobrajan	13.582	14.349	27.931
12.	Gedongtengen	9.711	10.165	19.876
13.	Jetis	13.167	13.950	27.117
14.	Tegalrejo	18.215	18.943	37.158

Sumber : (<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id>,201712/05/2019)

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat kita lihat bersama bahwa Penduduk Kota Yogyakarta yang paling banyak berada di Kecamatan Umbulharjo yakni sebanyak 69.817 jiwa, sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling kecil adalah Pakualaman dengan 10.777 jiwa.

4.2.3.2 Kepadatan Penduduk Di Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta bisa dibilang Kota yang penduduknya tidak terlalu padat. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta tahun 2018 kepadatan penduduk di jogja sebanyak 16.636 jiwa per kilometer persegi. Kecatamatan di Kota Yogyakarta yang memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Kecamatan Umbulharjo dengan 9.527 jiwa perkilometer persegi, sedangkan Kecamatan Ngampilan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni sebanyak 23.916 jiwa per-kilometer persegi (BPS Kota Yogyakarta 2018).

Berikut ini tabel kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta :

Tabel IV.2
Kepadatan Penduduk Di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah	Kepadatan Penduduk
1.	Mantrijeron	2,61	35.388	13.933
2.	Kraton	1,40	21.935	15.781
3.	Mergangsan	2,31	32.100	15.173
4.	Umbulharjo	8,12	69.817	9.528
5.	Kotagede	3,07	34.081	10.150
6.	Gondokusuman	3,99	42.522	13.564
7.	Danurejan	1,10	21.274	20.059
8.	Pakualaman	0,63	10.777	18.780

9.	Gondomanan	1,12	15.041	13.837
10.	Ngampilan	0,82	18.586	23.916
11.	Wirobrajan	1,76	27.931	16.901
12.	Gedongtengen	0,96	19.876	20.778
13.	Jetis	1,70	27.117	17.056
14.	Tegalrejo	2,91	37.158	13.491

Sumber : (BPS Kota Yogyakarta ,2018 :70).

4.2.3.3 Gambaran Umum Budaya di Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta dikenal sebagai Kota yang berhati nyaman. Nyaman yang dimaksud disini bisa juga berarti nyaman dalam aspek masyarakat dengan sifat yang ramah yang dimiliki oleh warganya. Terbukanya masyarakat Kota Yogyakarta yang mewujud melalui perangai masyarakatnya yang ramah tamah salah satunya disebabkan akulturasi budaya sebagai konsekuensi logis banyaknya kampus maupun institusi pendidikan lain di Kota ini. Selain itu, Kota Yogyakarta juga dikenal sebagai Kota dengan aspek kebudayaan jawa yang tulen dan lekat, dengan *atmosphere* kehidupan keraton yang sarat dengan nilai dan norma kesopanan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat Kota Yogyakarta memandang kebudayaan serta kesenian sebagai sesuatu yang harganya amat mahal. Masyarakat Kota Yogyakarta menjunjung tinggi seni dan budaya, sebab sejak kecil mereka terbiasa disuguhkan pentas pentas bernuansa kesenian dan juga kebudayaan, tak jarang mereka ikut berpartisipasi dalam

berbagai pagelaran tersebut. Tak ayal bagi masyarakat yang hidup di Kota Yogyakarta bahwa tradisi memegang peran penting dalam melengkapi dan mewarnai kanvas kehidupan, tradisi berbaur dan seirama menyatu dengan seni dan keduanya tertuang dalam pagelaran pertunjukan seperti pagelaran seni maupun ritus kebudayaan lainnya. Berbicara tentang seni, Kota Yogyakarta mempunyai banyak kesenian seperti : Wayang Kulit, Ketoprak, Jathilan, dan ludruk, dan biasanya kesenian-kesenian tersebut tertuang dalam wadah-wadah seperti ritual adat.

4.2.3.4 Aspek Ekonomi

Titik berat tata kelola perekonomian di Kota Yogyakarta adalah formulasi kebijakan, pola komunikasi, bimbingan, monitoring, evaluasi aspek ekonomi dengan upaya menaikkan PAD dan juga dengan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam beberapa bidang terkait seperti : Tehnologi informasi, bidang kebudayaan, bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa. Semua upaya tersebut dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Peningkatan daya saing ekonomi, Perluasan kesempatan kerja, Peningkatan kepariwisataan.

Selanjutnya, Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi DIY menurut data yang dihimpun penulis tentang gambaran atau deskripsi ekonomi mendapati bahwa berdasarkan analisa ekonomi atas dasar Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai 5,24 persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,24 persen meningkat dibanding tahun 2016 yang mencapai 5,11 persen. Secara regional, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta berada dibawah angka Provinsi Daerah Keistimewaan Yogyakarta sedikit yang mencapai 5,26 persen (BPS Kota Yogyakarta , 2017; 417).

Tahun 2017 semua kategori ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,85 persen. Di ikutikategori jasa perusahaan 6,42 persen, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,76 persen. Delapan kategori mengalami pertumbuhan positif diatas lima persen. Sedangkan Sembilan kategori lainnya mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 persen (BPS Kota Yogyakarta, 2017;353).

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta menurut pengeluaran pada 2017 tertinggi dicapai oleh komponen konsumsi lembaga non profit yang mencapai 10,15 persen meningkat pesat dibanding tahun 2016 yang hanya 4,14 persen. Tingginya konsumsi tersebut di sebabkan pelaksanaan pilkada. Sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat dari 4,03 persen pada 2016 menjadi 5,19 persen di tahun 2017. Pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 3,05 persen yang artinya agak sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu pertumbuhan ekspor impor mengalami kenaikan

sebesar 4,31 persen untuk ekspor dan 4,14 persen untuk impor (BPS Kota Yogyakarta , 2017 ;355) .

Sementara itu dari aspek gini rasio, tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2017 lebih buruk jika dibandingkan dengan tahun 2016, walaupun tidak terlalu signifikan. Secara kualitatif, hal tersebut ter-identifikasikan dengan kurva Lorenz pada tahun 2017 yang bergeser sedikit menjauh dari garis diagonal dibandingkan gambaran kurva Lorenz pada tahun sebelumnya atau 2016 (BPS Kota Yogyakarta, 2017; 363).

Secara kuantitatif ukuran tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dapat dilihat dari angka gini rasio. Pada tahun 2017 gini rasio kota Yogyakarta tercatat sebesar 0,446 yang artinya lebih tinggi 0,017 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya atau 2016 (BPS Kota Yogyakarta ,2017;364).

Pada tahun 2017 menurut total penduduk, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah(masyarakat lapis bawah) menyerap sebanyak 12,79 persen dari total pendapatan, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan menengah mendapat 39,21 persen dan kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mendapat 48,0 persen. Berdasarkan kriteria World Bank, kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di Kota Yogyakarta pada Tahun 2017 tergolong berketimpangan sedang atau moderat, dimana kelompok berpenghasilan rendah menerima diantara 12 sampai 17 persen dari total pendapatan (BPS Kota Yogyakarta, 2017;370).

4.3 Gambaran Umum Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017

4.3.1 Dinamika Politik Pilkada Kota Yogyakarta

Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat II mulanya dipilih dari hasil musyawarah DPRD. Selanjutnya, pengejawantahan dari ikhtiar bangsa ini untuk terus berbenah menciptakan kehidupan bernegara yang lebih demokratis adalah dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yang dipilih oleh rakyat. Kota Yogyakarta melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pertama kalinya yakni pada Pemilihan Umum di Tahun 2006. Secara regulatif, landasan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Undang-undang tersebut berbicara banyak tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah menjabarkan tentang aspek penyelenggaraan Pilkada yang meliputi ; fase pemilihan Kepala Daerah, pengesahan Kepala Daerah terpilih, Pengangkatan atau Pelantikan Kepala Daerah terpilih serta tata cara dan aspek mengenai pemberhentiannya.

Dalam pagelaran pemilihan Walikota dan juga Wakil Walikota di Kota Madya Yogyakarta 15 Agustus Tahun 2001 silam dengan mekanisme pemilihan langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta di ikuti

oleh 3 Paslon. Paslon pertama Hery Zudianto dan Syukri Fadholi, Paslon ke-2 Endang Darmawan dan Muhammad Wahid, dan Paslon yang terakhir Sasongko dan Bambang D. Pribadi.

Melalui mekanisme Pemilihan tersebut Pasangan Hery Zudianto dan Syukri Fadholi yang didukung oleh Fraksi PAN dan Persatuan Islam berhasil memenangkan kontestasi. Pemilihan digelar dua putaran karena factor regulasi yang mengharuskan pemenang wajib memperoleh 38 suara atau 50+1 %. Dalam pemilihan putaran ke-2 hanya di ikuti oleh Pasangan Hery Zudianto dan Syukri Fadholi yang bertarung melawan pasangan Endang Darmawan dan Muhammad Wahid. Hery-Syukri berhasil mengungguli Endang-Wahid dengan meraih 21 suara sedangkan lawannya hanya memperoleh 16 suara (Ade, 2009;40).

Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 maka secara otomatis Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pada gelaran pertama Pilkada langsung pada tahun 2006 di Kota Yogyakarta itu mempertemukan dua pasangan calon yakni Pasangan Widharto dan Syukri Fadholi yang bersaing sengit dengan Hery Zudianto dan Haryadi Suyuti untuk merebut simpati masyarakat. Hasil dari perhelatan tersebut mengangkat Pasangan Hery Zudianto dan Haryadi Suyuti menjadi pasangan pertama yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai Walikota dan Wakil Walikota. Hery dan Haryadi yang didukung koalisi tiga Partai Politik (Partai Amanat Nasional, Golkar dan Partai Demokrat) menang dengan meraih

suara sebanyak 111.700, mengungguli lawannya pasangan Widharto dan Syukri Fadholi yang meraih suara sebanyak 69.844 yang didukung oleh PPP, PKS, dan PDIP (Ade, 2009;40).

Pagelaran Pilkada langsung jilid II di Kota Yogyakarta yang di adakan pada tahun 2011 cukup menarik antusias para elit politik local. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah Paslon yang ikut berpartisipasi dan berkompetisi yakni sebanyak 3 Paslon lebih banyak dari Pilkada sebelumnya yang hanya di ikuti oleh 2 Paslon saja. Koalisi Partai Persatuan Pembangunan, PAN, Gerindra, dan Partai Demokrat mengusung Pasangan Hanafi Rais dan Tri Harjun Ismaji (FITRI) untuk bertarung menjadi kandidat Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta , Selanjutnya Koalisi Partai Golkar dan PDIP mengusung Pasangan Haryadi Suyuti dan Imam Priyono, dan terakhir koalisi Partai Keadilan Sejahtera, PRN, PKPB,PKDI, dan Hanura mengusung Zuhrif Huda dan Aulia Reza Bastian sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2011. Setelah dilakukan penghitungan suara pasangan Haryadi Suyuti dan Imam Priyono berhasil memenangkan kontestasi dan keluar sebagai pemenang dengan meraih 97.074 suara atau dengan persentase 48,3, sedangkan kompetitornya pasangan Hanafi Rais dan Tri Harjun Ismaji berada di urutan ke-2 dengan perolehan suara 84.122 atau 41,9 persen, dan pasangan Zuhrif Huda dan Aulia Reza Bastian berada di urutan terakhir dengan raihan suara 19.557 atau sebanyak 9,7 persen (<https://news.detik.com/berita/d-1733625/kpu-kota-yogya-tetapkan-walikota--wakil-walikota-terpilih>, 22/05/2019).

Pembenahan di tubuh Demokrasi dalam Negara Indonesia terus dilakukan. Buah dari upaya tersebut adalah lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak di Seluruh Indonesia. Pilkada serentak periode pertama dilaksanakan pada tahun 2015 dan diikuti oleh 272 daerah, setelahnya pada tahun 2017 Pilkada langsung serentak periode berikutnya kembali digelar yakni pada tahun 2017 dan diikuti oleh 101 Daerah. Dan Pilkada Kota Yogyakarta pada tahun 2017 lalu termasuk kedalam gelaran Pilkada langsung serentak jilid II di seluruh Indonesia. Setelah dilakukannya Pemilukada Kota Yogyakarta pada tahun 2017, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pada pilkada tahun 2017 yang telah dilakukan disetiap kecamatan, hasil perolehan suara pada Pilkada Kota Yogyakarta tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 yaitu pasangan Hariyadi Suyuti-Heroe Poerwadi sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Pasangan Hariyadi Suyuti dan Heroe Purwadi menang dengan meraih 100.332 atau 50,30 persen suara, sedangkan Imam Priyono-Ahmad Fadli meraih 99.143 atau 49,70 % suara dari 794 TPS di Yogyakarta.

Tabel IV.3
Perolehan Suara Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017

NO	KECAMATAN	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
		Imam-Fadli	Haryadi-Heroe		
1.	Mergangsan	7.727	8.237	15.964	1.276

2.	Mantrijeron	8.619	8.811	17.430	1.086
3.	Kraton	5.123	5.850	10.973	874
4.	Wirobrajan	5.942	7.250	15.964	878
5.	Ngampilan	3.549	5.099	8.648	676
6.	Gondomanan	3.975	3.799	7.774	479
7.	Pakualaman	2.879	2.432	5.311	379
8.	Gedongtengen	5.801	4201	10.002	610
9.	Jetis	8.026	4.970	12.996	802
10.	Tegalrejo	9.732	8.330	18.062	706
11.	Gondokusuman	11.263	8.729	19.992	1.202
12.	Danurejan	5.639	4.933	10.572	780
13.	Umbulharjo	14.883	17.326	32.209	2.437
14.	Kotagede	5.942	10.399	16.387	1.191
	Jumlah Total	99.146	100.333	199.479	13.374
	Persentase	49,69 %	50,31%	100%	

Sumber : (KPU Kota Yogyakarta, <https://pilkada2017.kpu.go.id> 27/09/2018: 3).

Dalam Pilkada Kota Yogyakarta tersebut pada awalnya sempat di ikuti oleh Calon Indipenden Garin Nugraha yang di usung Gerakan Join (jogja independen), namun karena syaratnya tidak mencukupi akhirnya hanya dua pasangan Calon yang kemudian berkontestasi (<https://www.merdeka.com/peristiwa/garin-nugroho-terpilih-jadi-calon-wali-kota-dari-joint.html> 20/04/2019).

4.3.2 Partisipasi Pemilih di Kota Yogyakarta dalam Pilkada 2017

Adapun Daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Pada Tahun 2017 dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel IV.4
Daftar pemilih tetap

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	Danurejan	51	7.984	8.390	16.374
2.	Gedongtengen	46	7.210	7.860	15.070
3.	Gondokusuman	82	14.717	16.174	30.891
4.	Gondomanan	29	5.553	6.094	11.647
5.	Jetis	43	9.339	10.215	19.554
6.	Kotagede	65	11.133	11.921	23.054
7.	Kraton	44	8.125	8.992	17.117
8.	Mantrijeron	69	12.354	13.307	25.661
9.	Mergangsan	73	11.362	12.519	23.881
10	Ngampilan	32	6.134	6.764	12.898

11.	Pakualaman	22	3.943	4.481	8.424
12	Tegalrejo	61	12.714	13.637	26.351
13.	Umbulharjo	134	22.903	24.780	47.683
14	Wirobrajan	43	9.836	10.548	20.384
	Total	794	143.307	155.682	298.989

Sumber :(KPU Kota Yogyakarta Tahun 2017)

Tabel IV.5
Tingkat partisipasi pemilih

No	Uraian	Rincian	
1	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih		
A	Data Pemilih		
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK	143.307
		PR	155.682
		JML	298.989
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan	LK	432
		PR	384
		JML	816
	3. Pemilih Terdaftar dalam DPT tambahan	LK	1025
		PR	1184
		JML	2209
	4. Jumlah Pemilih 1+2+3	LK	144.764
		PR	157.250
		JML	302.014

A	Data Pengguna Hak Pilih		
	1. 1 . Pemilih terdaftar dalam DPT	LK	97.166
		PR	113.771
		JML	210.937
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan	LK	369
		PR	319
		JML	688
	3. Pemilih Terdaftar dalam DPT tambahan	LK	10.25
		PR	1.184
		JML	2.209
	4. Jumlah Pemilih 1+2+3	LK	98.650
		PR	115.274
		JML	213.834

Sumber :(KPU Kota Yogyakarta Tahun 2017)

Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada tahun sebelumnya (2011). Pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2011 tingkat partisipasi pemilih berada pada persentase 64 % sedangkan KPU Daerah Kota Yogyakarta menargetkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2017 meningkat dengan estimasi 67,5%. Namun melampaui ekspektasi KPU Daerah Kota Yogyakarta tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada 2017 berada di angka 70% atau lebih banya 6 % dari pemilihan sebelumnya dan melampaui ekspektasi dan estimasi internal KPUD Kota Yogyakarta

https://krjogja.com/web/news/read/17159/KPU_Kota_Yogya_Targetkan_67_5_Pemilih12/04/2019).

4.3.3 Gambaran Umum Pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi

4.3.3.1 Profil Haryadi Suyuti

Haryadi Suyuti lahir di Yogyakarta, 9 Februari 1964. Ayahnya pernah menjadi Rektor IAIN Walisongo Semarang, Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi (1997 - 1999), Duta Besar RI untuk Republik Arab Suriah, dan juga aktif pada organisasi Muhammadiyah. Haryadi Suyuti menikah dengan Hj. Tri Kirana Muslidatun, S.Psi yang banyak aktif di berbagai kegiatan social. Saat ini dikaruniai 2 orang anak. Pendidikan formal Haryadi dimulai di SDN II IKIP Yogyakarta, menempuh pendidikan lanjutan di SMPN 5 Semarang, bersekolah di SMAN 1 Yogyakarta, dan menjadi mahasiswa di Fisipol Universitas Gadjah Mada.

Semasa mahasiswa Haryadi aktif berorganisasi, misalnya dengan mengikuti : Keluarga Mahasiswa Administrasi Negara Fisipol UGM. Selesai kuliah Haryadi juga aktif di Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Aktif di Kepanitiaan Muktamar I Abad Muhammadiyah pada tahun 2010 silam. Menjadi Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Yogyakarta, Menjadi Ketua PERBAI DIY (Tahun 2007 sampai Tahun 2011, dan pada Tahun 2011 sampai 2016), Haryadi juga pernah menjadi Ketua Badan Narkotika Kota Yogyakarta periode 2007 sampai 2011, Anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Wakil Ketua Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Yogyakarta periode 2010-2015, Ketua

PERBASI DIY Tahun 2011-2015 dan Ketum PSIM Yogyakarta pada tahun 2010 sampai 2013.

Haryadi dikenal sebagai ekonom handal adapun Riwayat pekerjaan Haryadi adalah ; Pada Tahun 1990 sampai 1991 Haryadi bekerja sebagai Management Trainee di PT Bank Sampoerna International, setelahnya pada tahun 1991 sampai 1996 Haryadi bekerja di PT Finance Corpindo Nusa, pada tahun 1996 sampai 2003 Haryadi menjabat sebagai Direktur Corporate Finance & Government Relation PT Finance Corpindo Nusa, Setelah itu pada tahun 2003 Haryadi bekerja di Corporate Secretary BOD non Directorat PT PT Indofarma (Persero) Tbk di Jakarta sampai tahun 2006. Karir politiknya dimulai pada tahun 2006 bersama Heri Zudianto ia menjabat sebagai Wakil Walikota Yogyakarta periode Tahun 2006 sampai 2011, hingga pada tahun 2012 sampai 2016 ia menjabat menjadi Walikota Yogyakarta (<https://www.jogjakota.go.id/pages/profil-pimpinan-daerah> 23/05/2019).

4.3.3.2. Profil Heroe Poerwadi

Heroe Poerwadi, lahir di Gunungkidul, 17 Januari 1966. Pendidikan formalnya dimulai di SDN Wonosari V Gunung Kidul, setelah itu ia bersekolah di SMPN 1 Wonosari Gunung Kidul, pendidikan SMA di SMAN 2 Wonosari Gunung Kidul , dan menempuh pendidikan tinggi sebagai mahasiswa S1 Fisipol Universitas Gadjah Mada pada tahun 1984 sampai dengan 1991, Pendidikan Pascasarjana ia tempuh di S2 Komunikasi Universitas Gadjah Mada dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

Heroe Poerwadi pernah menjadi wartawan, akademisi, dan Politisi. Karir wartawannya ia tempuh selama kurang lebih 17 tahun. Sebelum menjabat sebagai Wakil Walikota, beliau sudah menjalani profesi sebagai wartawan selama lebih dari 17 tahun, Karir akademisi Heroe dimulai di AKINDO, selain menjadi dosen ia juga pernah menjadi direktur selama dua periode berturut-turut. Di dunia politik sosok Heroe lumayan dikenal di Jogja. Ia adalah salah satu orang yang turut serta mendirikan Partai Amanat Nasional, aktif di PAN dan menjadi Anggota legislative dua periode berurut-turut (<https://www.jogjakota.go.id/pages/profil-pimpinan-daerah>23/05/2019) .

4.3.3.4 Visi Pasangan Haryadi-Heroe

Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi dalam Pilkada Kota Yogyakarta Pada Tahun 2017 lalu mengusung Visi “*Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan*”. Visi tersebut di dasari atas Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta No.1 pada Tahun 2007 yang tertuang dalam RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dimulai sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 (Dokumen Visi, Misi, dan Program Haryadi-Heroe, 2016).

Selanjutnya, penjabaran atau penjelasan lebih jauh mengenai visi tersebut adalah :**Meneguhkan Kota Yogyakarta** mempunyai makna penegasan lebih jauh bahwa Jogja secara lahiriah merupakan kota yang nyaman huni bagi semua elemen, serta sebagai pusat pelayanan jasa yakni melalui upaya penguatan pada

nilai dan juga daya saing daerah yang berpijak pada tata nilai dan norma keistimewaan sebagai filosofi hidup masyarakat Kota Yogyakarta sekaligus cita-cita di masa yang akan datang.

Kota Yogyakarta sebagai sebuah **kota yang nyaman huni** mempunyai arti bahwa : (1) Meningkatkan pemberdayaan serta kemandirian bagi masyarakat Kota Yogyakarta dengan jalan menciptakan kondusifitas bagi berkembangnya nilai social dan juga budaya masyarakat. (2) Masyarakat Kota Yogyakarta juga harus dan wajib mempunyai kualitas yang baik, baik dalam artian berada di atas angka rata-rata Nasional, dan hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta yang tinggi. (3) Pelayanan Publik dalam hal kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat di proyeksikan terus mengalami peningkatan melebihi standar yang telah ditetapkan. (4) Warga Masyarakat dalam melakukan aktifitasnya ditunjang oleh baik dan berkualitasnya fasilitas publik. (5) Serta laju perekonomian yang makin cepat sehingga meniscayakan kesejahteraan hidup bagi masyarakat dan dapat menggerakkan geliat sektor pembangunan (Dokumen Visi, Misi, dan Program Haryadi-Heroe, 2016).

Selanjutnya, penegasan lebih jauh mengenai Kota Yogyakarta sebagai kota **pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat** yakni : (1). Kota Yogyakarta sebagai Kota pusat pelayanan jasa di proyeksikan akan mengalami kemajuan dan juga perkembangan. Sehingga denganya Jogja mampu menjadi pemenang dan

meng-ungguli daerah lain dalam hal perbandingan juga kompetisi. (2) Membenahi system pelayanan dan juga kelembagaan menjadi lebih mudah, serta juga kondusif bagi iklim investasi, sehingga nantinya dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta. (3) Meneguhkan dan menguatkan identitas Kota Jogja sebagai Kota yang ramah terhadap sektor usaha dan kerjasama dengan kota lain. (4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan jalan meningkatkan aktifitas dalam aspek pendidikan serta pariwisata yang notabene menjadi penggerak utama layanan jasa di Kota Yogya, sehingga nantinya sector lain juga akan melakukan akselerasi (Dokumen Visi, Misi, dan Program Haryadi-Heroe, 2016).

Penjabaran lebih lanjut dan eksplisit tentang Kota Yogyakarta yang berorientasi pada **keberdayaan masyarakat** yaitu: (1). Peningkatan keterlibatan dan antusias masyarakat dalam menciptakan gaya hidup yang bersih dan juga sehat. (2). Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil berahlak mulia dan juga cerdas. (3). Peningkatan dan penciptaan budaya kerja yang sesuai dengan tantangan revolusi industri 4.0 yakni cerdas dan menguasai tehnologi, kaya akan prestasi dan penghargaan, dan juga penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. (4) Mengurangi jumlah pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja baru dan juga tenaga kerja yang produktif. (5) Menciptakan masyarakat yang padu dan solid melalui semangat gotong royong serta mencegah kemungkin terjadinya konflik sosial (Dokumen Visi, Misi, dan Program Haryadi-Heroe, 2016).

Terakhir pemaknaan tentang Kota Yogyakarta yang **berpijak pada nilai keistimewaan** adalah sebagai berikut: (1). Peningkatan keterlibatan, antusias serta kesejahteraan warga jogja melalui pembangunan daerah yang dilandasi akan nilai-nilai keistimewaan. (2) Penyelenggaraan pemerintahan yang terus mengalami peningkatan dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan berlandaskan asas Keistimewaan jogja seperti yang termaktub dalam UU tentang Keistimewaan Jogja. (3) Penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan, serta melakukan pembangunan Daerah dengan didasari semangat kebudayaan ngayogyakarta hadiningrat yang berkarakter, berwawasan tentang lingkungan, sarat akan nilai-nilai religi, dan juga mendorong masyarakat kota jogja untuk mengisi pembangunan dalam semangat “*jogja berkemajuan*” ditopang dengan adanya produktivitas.

4.3.3.5 Misi Pasangan Haryadi-Heroe

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi untuk mewujudkan Visi “*Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan*” yakni dengan memformulasikan beberapa misi agar beberapa tujuan yang dicanangkan atau direncanakan dapat tercapai. Beberapa Misi tersebut diantaranya :

1. Membuat Kota Yogyakarta menjadi Kota yang berdaya saing tinggi, sehingga dengannya masyarakat di Kota Yogyakarta akan mendapatkan kesejahteraan.
2. Memperkuat ekonomi dan keberdayaan masyarakat Kota Yogyakarta melalui ekonomi kerakyatan
3. Memperkuat kualitas dan identitas sosial di dalam masyarakat Kota Yogyakarta dengan penguatan pada aspek budaya, moral dan etika.
4. Memperkuat dan menciptakan kota yang tertata dengan baik serta memiliki lingkungan yang asri dan juga lestari.
5. Peningkatan dalam hal kualitas beberapa aspek penting di Kota Yogyakarta yakni sosial, budaya, kesehatan dan juga pendidikan.
6. Melakukan pembangunan dan peningkatan fasilitas Publik dan pemukiman yang baik.
7. Penciptaan *good government* dan pelayanan public yang cepat, berkualitas, baik, memuaskan, dan juga bersih dan bebas KKN (Dokumen Visi, Misi, dan Program Haryadi-Heroe, 2016)..

4.3.3.6 Gambaran Umum Tim Tim Pemenangan Haryadi-Heroe

Pasangan Haryadi-Heroe di usung dan didukung oleh beberapa Partai Politik diantaranya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan juga Partai Demokrat. Berikut rincian perolehan suara Partai-Partai tersebut dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu ; PAN 30.952 suara, Gerindra sebanyak 26.959 suara, PPP

meraih 21.080 suara, PKS sebanyak 18.587 suara, Golkar sebanyak 17.763 suara, dan Demokrat sebanyak 18.031 suara (<https://news.detik.com/berita/d-2561356/pdip-berkuasa-di-kota-yogyakarta,8/05/2019>).

Selanjutnya, dari 40 Anggota Legislatif di DPRD Kota Yogyakarta, sebanyak 24 Anggota Legislatif berasal dari partai pengusung pasangan Haryadi-Heroe. Berikut adalah rinciannya ; Partai Golkar memperoleh 5 kursi Legislatif, Partai Gerindra memperoleh 5 kursi Legislatif, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 4 kursi Legislatif, Partai Amanat Nasional 5 Kursi Legislatif, Partai Persatuan Pembangunan 4 kursi dan terakhir Partai Demokrat dengan 1 kursi.

Adapun susunan tim pemenangan Haryadi-Heroe menurut data internal Tim Sukses adalah sebagai berikut :

Ketua Stering Commite	: M. Sofyan.
Ketua Koalisi	: Rifki Listianto.
Wakil Ketua I Koalisi	: John Keban.
Wakil Ketua II	: Ashad Kusumajaya.
Sekretaris Eksekutif	: Hartono.
Badan Pemenangan Pemilu	: Edi Prayitno.
Juru Bicara	: Arif Noor Hartanto.